



## ISU PENCARI SUAKA DAN KEBIJAKAN UNI EROPA

Adirini Pujayanti \*)

### Abstrak

*Uni Eropa (UE) sedang menghadapi krisis keimigrasian terbesar sejak Perang Dunia II dengan meningkatnya gelombang pencari suaka Suriah ke Benua Eropa. Mayoritas pemerintah di negara-negara Eropa berupaya menutup negaranya dari serbuan para pencari suaka. Tidak sekedar menjadi masalah pelik, krisis pencari suaka di Eropa juga menimbulkan gesekan di antara negara anggota UE. Setiap negara bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Banyak aturan UE tentang proses suaka tidak dilaksanakan. Sistem bebas visa antar-negara Eropa yang pernah dibanggakan Eropa mulai dipertanyakan.*

### Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan lebih dari 220.000 orang tewas dalam konflik Suriah yang dimulai sejak Maret 2011. Lebih dari 9 juta warga Suriah mengungsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Di lain tempat, atuhnya rezim Muammar Khaddafi atas dukungan Eropa telah meninggalkan negara Libya dalam kekacauan. Kondisi Libya dimanfaatkan sindikat penyelundupan manusia sebagai daerah basis pengiriman pencari suaka, terutama dari Suriah ke Eropa.

Sebelum para pencari suaka tiba di Eropa, AS dan Eropa terkesan membiarkan konflik di Suriah terus berlangsung dan tidak banyak berbuat. Saat ini, Eropa menghadapi krisis keimigrasian terbesar sejak Perang

Dunia II dengan meningkatnya gelombang pencari suaka Suriah ke benua tersebut. Badan perbatasan UE, Frontex, melaporkan bahwa lebih dari 310.000 pencari suaka telah menyeberangi laut Mediterania ke Eropa tahun ini, sekitar 40% lebih banyak dari pada semua 2014. Rasa kemanusiaan warga negara Eropa tergugah dengan ditemukannya 71 jenazah pencari suaka Suriah dalam sebuah truk di Austria dan terdamparnya mayat bocah imigran Aylan Kurdi usia 3 tahun di pantai Turki.

### Perbedaan Kepentingan Negara Anggota UE

Kebijakan-kebijakan anti-pencari suaka di Eropa mulai mendapat kecaman dari warga benua itu sendiri. Krisis migrasi

\*) Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional, pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: adirini.pujayanti@dpr.go.id.



yang terjadi saat ini telah menjadi tes besar bagi kesiapan dan persatuan UE. Mayoritas pemerintah negara-negara Eropa cenderung enggan menerima pencari suaka, menahan laju pencari suaka masuk ke negaranya, dan mengatasi penyebab migrasi dengan menggunakan opsi militer. Negara-negara anggota UE telah menolak kuota migran yang bersifat mengikat dan memilih melaksanakan kuota sukarela. Namun demikian, gelombang pencari suaka yang terus datang memaksa UE menyusun kuota migran baru yang lebih proposional.

Negara-negara garis depan seperti Yunani, Italia, Austria dan Hungaria kewalahan dan menolak untuk mengambil tanggung jawab lebih. Austria memperketat pengawasan perbatasannya dan akan memenjarakan pencari suaka ilegal. Sementara Slovakia, Polandia dan Hungaria telah mengatakan mereka mengutamakan pencari suaka beragama Nasrani. Kebijakan hanya menerima pencari suaka Nasrani mendapat kritikan dari pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Franciscus sebagai tindakan kekerasan. Inggris merupakan salah satu negara tujuan yang enggan menerapkan kebijakan suaka proporsional dibandingkan negara Eropa lain. Pemerintah Inggris akan segera menggelar sidang pemungutan suara untuk ambil sikap militer kepada Suriah. Swedia dan Jerman bersikap lebih terbuka dengan bersedia menerima pencari suaka jauh lebih banyak dibandingkan negara UE lainnya.

Perancis, Italia dan Jerman mendesak UE untuk menyusun kembali kuota migran baru yang lebih adil agar para pencari suaka ditempatkan dan dibagi secara adil di seluruh 28 negara anggota. UE diminta segera memperbaiki kesiapan terkait masalah ini, di antaranya menyediakan tempat pendaftaran dan penyaringan pencari suaka di negara antara, pusat kolektif di mana kebutuhan pencari suaka akan tempat tinggal dan makan dapat dipenuhi, dan daftar negara asal yang aman agar pengajuan suaka dari warga negara-negara yang aman tersebut dapat secara otomatis ditolak.

Penanganan pencari suaka di Eropa saat ini tidak lagi berpedoman pada Peraturan Dublin (Konvensi Dublin). Dalam

aturan Dublin, negara-negara di mana migran pertama kali masuk seharusnya melakukan penyaringan, hanya pencari suaka yang telah berstatus pengungsi yang berhak melanjutkan perjalanan ke negara tujuan. Sementara mereka yang berstatus non-pengungsi atau migran ekonomi akan dideportasi. Tetapi Itali dan Yunani yang selama ini kerap menjadi pelabuhan utama bagi gelombang kedatangan pencari suaka mengaku tidak sanggup untuk menangani masalah ini dan membiarkan para pencari suaka tersebut berlalu menuju Eropa Barat tanpa registrasi.

Serbuan pencari suaka juga menyebabkan sistem visa Schengen yang mulai diberlakukan Eropa sejak tahun 1995 hampir tidak berfungsi. Berdasarkan sistem Schengen, pemilik visa bisa melakukan perjalanan ke negara-negara dalam lingkup UE dan non-UE. Sejumlah negara UE berusaha memagari negaranya terhadap pencari suaka. Saat migran keluar dari negara garis depan, negara-negara lain menutup perbatasannya untuk mencegah mereka masuk. Kondisi tersebut sempat membuat kereta antar negara Eropa, Eurostar, tidak bisa diberangkatkan dari Perancis - Inggris karena dipenuhi oleh para pencari suaka hingga ke atapnya.

Dilain pihak Amerika Serikat yang merupakan sekutu Eropa, juga tidak berencana meningkatkan jumlah pengungsi yang akan diterima dengan drastis. AS hanya merujuk pada sumbangan sebesar US\$4 miliar untuk bantuan pengungsi dan mengulang kembali sikap pemerintah Obama terkait kekhawatiran akan keamanan masuknya militan dari ISIS atau al Qaeda masuk ke negaranya dengan berkedok pencari suaka. AS memilih untuk mempersenjatai para pemberontak Suriah dan memerangi ISIS.

Sementara sekutu Eropa di Arab yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yaitu Qatar, UEA, Arab Saudi, Kuwait, Oman dan Bahrain juga tidak menawarkan tempat untuk pengungsi meskipun memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan pencari suaka. GCC memilih mendanai kelompok pemberontak melawan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad dan mendanai kamp pengungsi

yang tersebar di Lebanon, Irak Utara dan Jordania. GCC menunjuk Iran dan Rusia yang ini mendukung Pemerintahan Suriah Bashar al-Assad untuk turut bertanggung jawab menampung para pencari suaka.

## Upaya Solusi Global

Krisis pencari suaka bukan merupakan masalah Eropa semata-mata. Tidak hanya di Suriah, konflik dan kekerasan di berbagai belahan dunia telah menyebabkan 60 juta orang terpaksa menjadi pengungsi. Badan Pengungsi PBB (*United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR*) menyebut satu tahun terakhir terjadi lonjakan jumlah pengungsi mencapai lebih dari 8,3 juta orang. Dilaporkan kini sekitar 10 juta orang di seluruh dunia berstatus tanpa kewarganegaraan (*stateless*) atau *no nationality*. Mayoritas pemerintahan di seluruh dunia enggan menerima mereka karena khawatir kebijakan tersebut akan menciptakan '*pull factor*' untuk menarik lebih banyak pencari suaka untuk datang ke negaranya.

Isu pencari suaka telah menjadi masalah dunia, Indonesia juga tidak terlepas dari masalah ini dengan masuknya para pencari suaka dari Rohingya asal Myanmar. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan kemanusiaan dengan menyediakan penampungan sementara. Namun secara tegas menyatakan Indonesia tidak menciptakan '*pull factor*' untuk menarik pengungsi datang. Pemerintah Indonesia melibatkan dua badan utama internasional yang menangani masalah pengungsi dan imigran, yaitu Organisasi Internasional untuk Migrasi (*International Organization for Migration/IOM*) dan UNHCR. Pemerintah Indonesia juga melibatkan Pemerintah Myanmar dalam penanganan pengungsi Rohingnya, sehingga berhasil mencapai kesepakatan.

Dewan Keamanan PBB tengah mendiskusikan kerangka resolusi untuk menangani krisis migran Eropa ini. Resolusi PBB yang dirancang tersebut akan memberikan kuasa kepada angkatan laut UE untuk mengambil alih kapal-kapal yang dioperasikan sindikat penyelundupan manusia di perairan internasional. Sindikat penyelundupan manusia merupakan pihak

yang paling diuntungkan dalam masalah ini. Para pencari suaka selama ini membayar lebih dari USD 1.000 per orang kepada sindikat untuk perjalanannya ke Eropa.

Australia mendesak lebih banyak negara di benua Eropa untuk bergabung dalam koalisi global melawan ISIS di Suriah dan Irak. ISIS dianggap bertanggung jawab atas eksodus ratusan ribu pencari suaka dari Suriah ke Eropa. Oleh karena itu, perluasan dan penguatan koalisi merupakan suatu keharusan. Saat ini sudah ada sekitar 60 negara, yang mendukung secara langsung atau tidak langsung, koalisi pimpinan Amerika Serikat tersebut. Usul Australia tampaknya sejalan dengan keinginan mayoritas pemimpin Eropa bahwa cara komprehensif untuk mencegah meningkatkan pencari suaka dan menciptakan damai di Suriah adalah memberantas sumber masalah, yaitu rezim Assad dan ISIS.

## Penutup

Dalam penanganan pencari suaka ini Sekjen PBB, BanKi-mon merencanakan pembahasan khusus masalah ini dalam pertemuan tahunan para pemimpin dunia di markas besar PBB pada tanggal 30 September mendatang. Isu pencari suaka merupakan masalah global yang membutuhkan kerja sama internasional untuk mengatasinya. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia dapat memberikan usul solusi berdasarkan pengalaman penanganan pencari suaka Rohingya di tanah air. UE harus lebih terbuka dan melibatkan UNHCR dan IOM dalam sebagaimana penanganan pencari suaka Suriah di Eropa.

Upaya penyelesaian isu pencari suaka harus dimulai dari hulu, yakni dari negara asal para pencari suaka. Penanganan masalah di hilir atau disaat para pencari suaka telah sampai di negara-negara tujuan setelah melalui perjuangan hidup dan mati sangat tidak manusiawi. Penyelesaian isu pencari suaka di negara asalnya patut dipertimbangkan. Indonesia dapat mendesak PBB untuk terus mencari penyelesaian damai dalam konflik Suriah, sebelum menempuh langkah militer yang pasti akan menimbulkan korban jiwa rakyat sipil.

Indonesia sebaiknya juga mendukung peningkatan kerja sama internasional dalam upaya membasmi sindikat penyelundupan manusia. Sindikat penyelundupan manusia selama ini menjadi salah satu sumber meningkatnya migrasi ilegal yang seringkali menjadi sumber sengketa antar negara.

### Referensi:

- "Uni Eropa masih terbelah", *Kompas*, 4 September 2015.
- "Jasad Bocah Imigran Terdampar, PM Inggris Diminta Bertindak", <http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/09/03/427334/jasad-bocah-migran-terdampar-pm-inggris-diminta-bertindak>, diakses 3 September 2015.
- "Australia Desak Negara Tujuan Imigran untuk Gempur ISIS", *Metrotvnews.com* <http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/08/31/163995/australia-desak-negara-tujuan-imigran-untuk-gempur-isis> diakses 3 September 2015.
- "PBB rancang resolusi krisis imigrasi mediterania", <http://internasional.Metrotvnews.com/read/2015/09/03/427266/pbb-rancang-resolusi-krisis-imigrasi-mediterania> Washington, diakses 31 Agustus 2015.
- "Jalan Kelam Para Migran", *Media Indonesia*, 4 September 2015.
- "Europe's halting response to migrant crisis draws criticism", *International New York Times*, 31 Agustus 2015, h. 5
- "Austria Tightens Border Controls", *The Wall Street Journal*, 1 September 2015, h. 6.
- "Migrant and smugglers appear to change tactics", *International Herald Tribune*, 1 September 2015, h. 5
- "Uni Eropa Didesak bangun Pusat penerimaan Migran", *Suara Pembaruan*, 31 Agustus 2015
- "Sistem Visa Mulai Digugat", *Kompas*, 3 September 2015
- "Negara-negara Arab Tolak Pengungsi", *Media Indonesia*, 7 September 2015.
- "PM Hungaria : Kami Tak Ingin Banyak Muslim", *Republika*, 5 September 2015
- "AS Ditekan Menerima Lebih Banyak Pengungsi", *CNN Indonesia*, 07/09/2015, <http://www.cnnindonesia.com/internasional/0150907091918-134-77015/as-ditekan-menerima-lebih-banyak-pengungsi/>, diakses tanggal 4 September 2015
- "Menlu Tak Ingin Penampungan Rohingya Tarik Pengungsi Lain", *kompas.com* <http://nasional.kompas.com/read/2015/06/10/02090561/Menlu.Tak.Ingin.Penampungan.Rohingya.Tarik.Pengungsi.Lain>, diakses tanggal 4 September 2015
- "Inggris Berencana Serang Suriah Untuk Akhiri Masalah Pengungsi", <http://news.detik.com/berita/3011442/inggris-berencana-serang-suriah-untuk-akhiri-masalah-pengungsi>, diakses tanggal 4 September 2015
- "UE Susun Kuota Migran yang Baru", *Republika*, 8 September 2015.
- "Tanggung Jawab Dunia Dipertanyakan", *Kompas*, 8 September 2015.
- Michael Ignatieff, "This isn't a European Problem", *International New York Times*, 7 September 2015.